

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nonformal merupakan salah satu satuan pendidikan nasional yang diperuntukkan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal juga berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan Nonform merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan jalur pendidikan formal dalam ruang lingkup yang berbeda, yang keberadaannya mengakomodir warga masyarakat yang karena dengan alasan tertentu, kebutuhan akan pendidikannya tidak dapat terlayani oleh pendidikan formal (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas)

Berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan nonformal, termasuk di dalamnya program Paket B, masih menghadapi beberapa permasalahan. *Pertama*, belum mendapat pemahaman dan perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan nasional, baik yang berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran sehingga pemerataan pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat di berbagai lapisan dan di berbagai daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. *Kedua*, masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada institusi pendidikan

nonformal di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola, mengembangkan, dan melembagakan pendidikan nonformal. *Ketiga*, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran pendidikan nonformal dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program pendidikan nonformal dengan kebutuhan pembangunan. *Keempat*, terselenggaranya kegiatan pendidikan nonformal di lapangan tergantung pada tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program pendidikan nonformal. *Kelima*, peran serta masyarakat dalam memprakarsai penyelenggaraan dan pelebagaan pendidikan nonformal masih relatif sangat rendah.

Di samping itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dijelaskan pula bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan nonformal bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya pikir, daya kalbu, dan daya fisik peserta didik sehingga yang bersangkutan memiliki lebih banyak pilihan dalam kehidupan, baik pilihan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pilihan kesempatan untuk bekerja, maupun pilihan untuk mengembangkan dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan nonformal perlu memberikan bekal dasar kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka siap menghadapi berbagai kehidupan nyata. Upaya-upaya tersebut bukan tidak berhasil sama sekali dalam

meningkatkan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan hidup tamatannya, akan tetapi kehidupan nyata menuntut pendidikan nonformal untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Pendidikan nonformal dituntut menghasilkan tamatan yang mampu, sanggup, dan terampil untuk menghadapi tantangan hidup serta berkompetisi dan berkolaborasi sekaligus. Pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, memiliki keleluasaan dalam mengembangkan dan membina berbagai macam programnya.

Seperti halnya penyelenggaraan pendidikan nonformal lainnya, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket B menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Namun demikian penyelenggaraan pendidikan nonformal lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta pengendali program. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara terus menerus memberi perhatian terhadap pendidikan nonformal sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan nonformal seyogianya menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan anak usia putus sekolah (Slamet, 2002).

Pendidikan Kesetaraan, sesuai Undang-undang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 tentang jalur pendidikan dan pasal 26 ayat 6, hasilnya dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Makna setara dalam konsep pendidikan kesetaraan adalah sepadan dalam hal eligibilitas, nilai, pengaruh atau

pengakuan lulusannya. Proses pembelajarannya harus dapat menjamin agar lulusannya memiliki kemampuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang berguna dalam menempuh kehidupannya. Kesetaraan bermakna kesamaan standar kompetensi lulusan yang harus dicapai yang sama dengan lulusan sekolah formal akan tetapi cara mencapainya yang berbeda. Perbedaan ini pula yang menjadi salah satu hal menarik untuk dikaji sebagai bahan kajian ilmiah.

Pada pendidikan formal banyak metode dan model pembelajaran yang diterapkan oleh para pendidik guna untuk menggali berbagai macam kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik sehingga mereka mampu berkompetensi untuk mengembangkan kreativitas tersebut melalui berbagai macam kompetisi di lingkungan sekolahnya, maupun antar sekolah baik di tingkat daerah kabupaten/kota tingkat provinsi, maupun tingkat nasional bahkan tingkat dunia yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alur pemikiran di atas menjadi inspirasi lahirnya gerakan untuk mengurangi rasa cemas dan putus asa dari warga belajar. Salah satu program alternatif pemecahannya adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal yang dianggap strategis dan merupakan dasar pengetahuan bagi seseorang (*the essential learning needs*). Kajian dan Inovasi pembelajaran yang searah dengan tuntutan zaman akan melahirkan strategi baru dalam program pendidikan nonformal khususnya dalam program pendidikan kesetaraan

Dalam pertimbangan akademis, teknik dan berbagai macam model pembelajaran yang diterapkan, dianggap efektif untuk menggali potensi dan

meningkatkan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya pada program Paket B.

Menurut UNESCO, pembelajaran yang efektif pada abad ini harus diorientasikan pada empat pilar yaitu, (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*. Keempatnya dapat diuraikan bahwa dalam proses pendidikan melalui berbagai kegiatan pembelajaran peserta didik diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, menerapkan atau mengaplikasikan apa yang diketahuinya tersebut guna menjadikan dirinya sebagai seseorang yang lebih baik dalam kehidupan sosial bersama orang lain.

Dalam rangka merealisasikan '*learning to know*', tutor memiliki berbagai fungsi yang di antaranya adalah sebagai fasilitator, yaitu sebagai teman sejawat dalam berdialog dan berdiskusi dengan warga belajar guna mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. *Learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu) akan bisa berjalan jika sekolah memfasilitasi warga belajar untuk mengaplikasikan keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat berkembang dan dapat mendukung keberhasilan warga belajar nantinya.

Learning to be (belajar untuk menjadi seseorang) erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang agresif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif peran tutor pengarah dan fasilitator sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya dalam kegiatan belajar dan pengembangan diri. Selanjutnya, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi

dan menerima perlu ditumbuhkembangkan termasuk dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses '*learning to live together*' (belajar untuk menjalani kehidupan bersama).

Dalam pelaksanaannya, tujuan belajar yang utama ialah bahwa apa yang dipelajari itu berguna di kemudian hari, yakni membantu kita untuk dapat belajar terus dengan cara yang lebih mudah, sehingga tercapai proses pembelajaran seumur hidup (*long life education*). Untuk mewujudkan hal ini, sangat dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, terutama antara peserta didik atau warga belajar dengan pendidik atau tutor. Peran tutor sebagai pendidik sangat penting; oleh karena itulah, tutor dituntut dapat menerapkan berbagai metode yang efektif dan menarik bagi warga belajar dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang aktif dan interaktif adalah model pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) karena melibatkan seluruh peserta didik dalam bentuk kelompok-kelompok. Ada sejumlah hal yang harus dipahami oleh pendidik atau tutor sebelum mengaplikasikan metode ini dalam proses pembelajaran di kelas.

Menurut Agus (2009: 45) model pembelajaran merupakan landasan praktis pembelajaran hasil penelusuran teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas, dengan kata lain model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai alat yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi dan memberi petunjuk pada guru di kelas.

Dengan pemilihan metode, strategi, pendekatan, serta teknik

pembelajaran, diharapkan adanya perubahan dari mengingat (*memorizing*) atau menghafal (*rote learning*) ke arah berpikir (*thinking*) dan pemahaman (*understanding*), dari model ceramah ke pendekatan *discovery learning* atau *inquiry learning*, dari belajar individual ke kooperatif, serta dari *subject centered* ke *learner centered* atau terkonstruksinya pengetahuan warga belajar. Hal inilah yang terlihat pada proses pembelajaran yang ada di PKBM-PKBM Kota Gorontalo yang pada umumnya masih berpusat pada pendidik atau tutor, keerdasan sosial warga belajar masih rendah dan belum meningkat, pembelajaran yang dilaksanakan belum optimal, penerapan model pembelajaran belum efektif, dengan kata lain bahwa proses pembelajarannya masih bersifat konvensional.

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap warga belajar yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, rendah). Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran

Belajar kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran melalui kelompok kecil warga belajar untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang saling asah, silih asih, dan silih asuh. Sementara itu, Bruner dalam Siberman menjelaskan bahwa belajar secara bersama merupakan kebutuhan manusia yang mendasar untuk merespons manusia lain dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Agus (2009: 67), semua model pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan pada model pembelajaran kooperatif berbeda dengan struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan pada model pembelajaran yang lain. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, warga belajar didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tutor. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik warga belajar meningkat dan warga belajar dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta berkembangnya keterampilan sosial atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi yang dimiliki oleh warga belajar. Keterampilan sosial merupakan indikator untuk melihat seseorang kecerdasan sosialnya tinggi atau rendah. Seseorang memiliki kecerdasan sosial tinggi, apabila dalam dirinya memiliki keterampilan sosial yang terdiri dari sejumlah sikap. Sikap tersebut adalah pertama, tumbuh *social awareness* (kesadaran situasional atau sosial). Maksud dari *social awareness* adalah kemampuan individu dalam mengobservasi, melihat, dan mengetahui suatu konteks situasi sosial, sehingga mampu mengelola orang-orang atau peristiwa yang ada di lingkungan sekitarnya seperti yang diharapkan dalam pembelajaran kooperatif.

Keunggulan dari model pembelajaran kooperatif menurut Agus Supriyono (2009: 68) adalah (1) membantu warga belajar belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan warga belajar

dalam praktik berpikir, (2) membantu warga belajar mengevaluasi logika dan bukti-bukti bagi posisi dirinya atau posisi yang lain, (3) memberikan kesempatan pada warga belajar untuk memformulasikan penerapan suatu prinsip, (4) membantu warga belajar mengenali adanya suatu masalah dan memformulasikannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari bacaan atau ceramah, (5) menggunakan bahan-bahan dari anggota lain dalam kelompoknya, dan (6) mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik

Dalam upaya mengembangkan model pembelajaran tersebut, program pendidikan nonformal terus berupaya membenahi diri dan mengembangkan berbagai program yang adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat. Kelembagaan nonformal dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat serta milik masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pembangunan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), secara bertahap terus dipacu dan diperluas guna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani melalui jalur pendidikan sekolah. Sasaran pelayanan pendidikan nonformal diprioritaskan kepada warga masyarakat yang tidak pernah sekolah, putus sekolah penganggur/miskin dan warga masyarakat lainnya yang ingin belajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya sebagai bekal untuk dapat hidup lebih layak. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional pada jalur pendidikan nonformal, khususnya pada PKBM banyak bergantung kepada berbagai faktor, baik secara internal sistem PKBM maupun faktor-faktor eksternal sistem PKBM.

Keinginan untuk mewujudkan suatu pendidikan universal melalui sekolah tidak mudah dilakukan. Akan lebih gampang jika pendidikan universal ini dilakukan melalui lembaga alternatif dengan meniru gaya persekolahan. Paling tidak, usaha seperti itulah yang kemudian dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sejak tahun 1998 melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran masyarakat sesuai dengan potensi daerah untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Pada awal pendiriannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat pusan berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang andal bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional. Selain itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diharapkan pula berfungsi sebagai tempat tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di antara warga masyarakat.

Saat ini di seluruh Indonesia terdapat sekitar 6.000 PKBM yang diprakarsai dan dikelola oleh berbagai kelompok masyarakat. Ada yang dikelola perorangan, perusahaan, lembaga kursus, pesantren, LSM maupun masyarakat lainnya. Kegiatan yang dilakukan PKBM tidak hanya menampung kegiatan yang dirancang oleh Ditjen PTK-PNF pada saat itu, tetapi juga menampung kegiatan dari sektor lain yang terkait. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal sesungguhnya

berbasis pada kebutuhan belajar (Forum PKBM Pusat, 2011)

Sesuai keberadaannya, meskipun para pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menyadari adanya keragaman dan kekhasan daerah masing-masing, akan tetapi masih terlihat adanya penekanan pada pembentukan struktur organisasi. Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) belum benar-benar memainkan peranan sebagai fasilitator yang melakukan *empowerment* terhadap masyarakat di daerah. Bahkan pada awal pembentukannya masih ada semacam rekayasa untuk mendorong masyarakat membuat PKBM.

Secara teknis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih ada yang ditangani dan dikelola aparat atau pejabat ataupun lembaga suwadaya masyarakat setempat. Pelaksanaannya masih dinilai berdasarkan jumlah dan prestasi pejabat melahirkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan bukan dari keberhasilan masyarakat dalam berbagai hal. Namun demikian sekecil apa pun usaha untuk pemberdayaan masyarakat, pasti akan membekas

Dalam kenyataannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih dihadapkan pada permasalahan internal dan eksternal (Balitbang Depdiknas dan Universitas Pendidikan Indonesia, 2006). Permasalahan internal, antara lain kurangnya motivasi warga belajar, keberadaan tutor belum berperan secara maksimal, kesulitan mencari lokasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki sarana memadai, pelaksanaan program dan proses pembelajaran belum sesuai dengan tuntutan. Permasalahan eksternal, terlihat belum adanya suatu pola kerjasama yang simultan antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan dunia usaha (asosiasi), perbankan/BPR

dan usaha kecil menengah setempat. Implikasinya adalah belum berjalannya kemitraan, kurikulum atau materi yang disampaikan kepada warga belajar sering berjangka pendek, temporer dan musiman. Kondisi program seperti ini, berdampak pada kesungguhan warga belajar dan para lulusannya dalam mengembangkan keterampilan, maupun meneruskannya dalam bentuk usaha keterampilan bermata pencaharian.

Arah baru dan perspektif masyarakat dalam bentuk tingginya partisipasi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dihadapkan pada persoalan dilematis berkenaan dengan rendahnya kapabilitas dan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) itu sendiri. Persoalan ini terungkap, dari hasil kajian beberapa data kasus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang kecenderungannya belum merujuk pada pemenuhan standar minimal manajemen yang telah diluncurkan Depdiknas. Salah satu contoh, program minimal yang harus dikelola oleh sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tiga jenis satuan pendidikan nonformal, dari hasil kajian dokumen (daftar PKBM) di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kota Gorontalo, masih terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang hanya menyelenggarakan satu atau dua satuan pendidikan nonformal.

Sesuai hasil identifikasi yang dilaksanakan oleh peneliti di Provinsi Gorontalo sampai pada tahun 2011 terhadap layanan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diperoleh informasi bahwa permasalahannya berkisar pada pengelolaan dan pengendalian mutu kelembagaan.

Hal tersebut terjadi karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan manajerial pengelola, penyelenggara program dan tenaga kependidikan, serta lemahnya partisipasi komponen terkait di luar lembaga, sehingga kurang optimalnya mekanisme sistem penyelenggaraan pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Atas dasar inilah yang dijadikan alasan mengapa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dijadikan latar pengembangan model pembelajaran kooperatif pada pendidikan kesetaraan program Paket B bagi peningkatan kecerdasan sosial warga belajar.

. Untuk indeks pendidikan antara lain ditentukan oleh keberhasilan Program Paket B dalam membantu menuntaskan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan membekali lulusannya dengan peningkatan kecerdasan sosial. Salah satu upaya ke arah itu maka melalui penelitian ini dikembangkan Model Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*) Bagi Peningkatan Kecerdasan Sosial Warga Belajar Program Paket B pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Gorontalo.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Hasil Survei di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program Paket B yang dirancang dengan sistem model pembelajaran kooperatif belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tenaga tutornya sebagian besar bukan berlatar belakang kependidikan, masih banyak yang belum memahami model pembelajaran

modul, minimnya administrasi pelaksanaan, rendahnya kemampuan manajerial pengelola dalam menyelenggarakan program dan persuasif pengelola terhadap tutor kurang nampak.

Disamping itu, masih ditemukan permasalahan pada sebagian pelaksana di lapangan dan lemahnya sistem monitoring pemerintah dalam upaya meminimalisir penyimpangan-penyimpangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa program pendidikan kesetaraan ini diminati oleh masyarakat yang ingin memperbaiki status pendidikannya. Birokrasi yang berkepanjangan juga menjadi salah satu kendala suksesnya tujuan dari program kesetaraan ini. Di sisi lain, upaya pemberdayaan dan mencerdaskan masyarakat melalui program kesetaraan ini harus memiliki sistem monitoring yang kuat untuk mengurang penyimpangan sekecil mungkin. Terutama sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan setempat dalam hal ini Bidang Pendidikan Nonformal dan informal, harus menyentuh level bawah, Kebijakan pemerintah masih menjadi harapan bagi mereka untuk merubah nasib kaum yang tertinggal, karena tak banyak pilihan. Penyimpangan pelaksanaan ujian dan biaya ujian kesetaraan yang simpang siur jumlahnya di lapangan telah menghambat tujuan dari program ini yaitu upaya untuk mencerdaskan masyarakat. Karena program ini satu-satunya jembatan pendidikan alternatif bagi anak-anak putus sekolah SMP atau sederajat dan anak-anak yang lulus sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang karna alasan tidak bisa melanjutkan ke jenjangan pendidikan berikutnya karena miskin untuk bisa menyetarakan statusnya di masyarakat, melalui jalur pendidikan nonformal pada saat ini, setidaknya ketika tak ada pilihan lain bagi orang miskin

untuk merubah nasibnya, evaluasi pelaksanaan program kesetaraan yang menyangkut masyarakat miskin, haruslah benar-benar diperhatikan dan dipastikan harus memihak kepada mereka.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah dalam penelitian ini dapatlah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Nomor 427/Diknas-PNFP/2003 sebanyak 17 PKBM dan yang menyelenggarakan khusus program Paket B berjumlah 11 PKBM yang tersebar pada 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Duingi yang masing-masing Kecamatan terdapat 3 PKBM Kondisi PKBM tersebut bervariasi, dari yang mulai merintis sampai dengan yang sudah dapat mengembangkan programnya secara proporsional. Sehubungan itu, agar dapat memberikan pembinaan yang tepat maka diperlukan penelitian yang dapat memberikan data objektif tentang pelaksanaan kegiatan di PKBM, termasuk di dalamnya Paket B.
2. Di Kota Gorontalo dari 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdapat dua PKBM dalam pelaksanaan dan pengelolaannya dianggap sangat baik yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Azzikra yang ada di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Taman Pendidikan yang berlokasi di Kelurahan

Tapa Kecamatan Kota Utara. Kedua PKBM tersebut sesuai hasil penilaian dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo telah berhasil dan berupaya menyelenggarakan dan mengembangkan program-programnya sesuai standar PKBM, baik dari sisi jenis program, kualifikasi, pengelola, tutor, dan aspek manajemen lainnya

3. Walaupun PKBM Al-zikra dan PKBM Tamana Pendidikan adalah 2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dianggap terbaik di Kota Gorontalo, namun dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan perlu difungsikan dan dioptimalkan secara efektif, apalagi kedua PKBM tersebut sampai saat ini belum memiliki model pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
4. Program Pendidikan kesetaraan Paket B adalah salah satu program yang dilaksanakan pada 2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kota Gorontalo yang memiliki standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal setingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah , namun konten, metode, teknik, dan pendekatan serta model pembelajaran untuk mencapai standat kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan keberhasilan warga belajar. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa warga belajar belum memperlihatkan kemampuan akademik yang unggul terutama dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Di samping itu warga belajar belum menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Kecerdasan sosial warga belajar belum nampak

diantaranya: berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji pembelajaran program Paket B agar lebih kreatif, tidak kaku dan tidak kehilangan pendidikan nonformal. Permasalahan ini secara umum diakibatkan oleh beberapa hal (1) semakin meningkatnya animo masyarakat terhadap program paket B sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus, (2) tuntutan masyarakat terhadap lulusan Paket yang ingin setara dengan lulusan formal sehingga menuntut waktu pembelajaran dan evaluasi belajar sama seperti sekolah, (3) tuntutan pemerintah terhadap target yang harus dicapai untuk meningkatkan IPM tinggi sehingga terjadi pemasalan pengelolaan dengan strategi pembelajaran yang klasikal, (4) rendahnya kualifikasi tutor sehingga penguasaan metodologi pembelajaran sangat monoton, penggunaan metode ceramah sangat membudaya. Di samping itu peran tutor sangat dominant sebagai pemberi informasi dan warga belajar sebagai penerima. Alternatif yang akan disodorkan adalah melalui metode Kooperatif. Program Paket B merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk pendidikan dasar setara SMP/MTS. Makna setara dalam hal ini adalah ditunjukkan pada pengaruh atau pengakuan civil effect lulusannya. Proses pembelajarannya diarahkan untuk menjamin agar lulusannya memiliki kemampuan, kecakapan dan nilai-nilai yang berguna dalam menempuh kehidupannya. Dengan demikian, belajar makna kesetaraan adalah kesamaan standar kompetensi lulusan yang dicapai dengan sekolah formal, tetapi cara

mencapainya berbeda. Perbedaannya ditinjau dari berbagai aspek; (1) strategi yang digunakan melalui kelompok belajar, (2) pendekatan pembelajaran menggunakan metode partisipatif, (3) kedudukan tutor berperan sebagai pendamping dan fasilitator. (4) bahan belajar menggunakan paket modul. (5) pertemuan belajar dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. (6) raga belajar diberikan secara insidental dan rutin, (7) kurikulum pembelajaran menekankan pada aspek kecakapan hidup yang holistic (8) evaluasi melalui sistem belajar tuntas. Sehingga diharapkan lulusan Paket B memiliki kemampuan yang dapat memenuhi tuntutan dunia kerja, berwirausaha dan bermasyarakat.

Di samping model dan teknik pembelajaran, perlu diperhatikan karakteristik peserta didik. Kecerdasan sosial merupakan salah satu jenis kecerdasan yang mempengaruhi dalam pembelajaran. Kecerdasan sosial peserta didik harus diperhatikan tutor karena rancangan pembelajaran disusun berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki peserta didik. Dimensi kecerdasan sosial peserta didik adalah kecerdasan sosial tinggi dan kecerdasan sosial rendah.

Menurut Buzan (2007), kecerdasan sosial adalah ukuran kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekeliling atau sekitarnya. Orang dengan kecerdasan sosial tinggi tidak akan menemui kesulitan saat memulai suatu interaksi dengan seseorang atau sebuah kelompok baik kelompok kecil maupun besar. Ia dapat memanfaatkan dan menggunakan kemampuan otak dan bahasa tubuhnya untuk “membaca” teman bicaranya. Kecerdasan sosial dibangun antara lain atas kemampuan inti untuk mengenali perbedaan, secara khusus perbedaan besar dalam suasana hati, temperamen, motivasi, dan kehendak. Dalam bentuk yang lebih maju, kecerdasan ini memungkinkan orang dewasa membaca kehendak dan keinginan orang lain, bahkan ketika keinginan itu disembunyikan. Kecerdasan sosial ini juga mencakup kemampuan bernegosiasi, mengatasi segala konflik, segala kesalahan, dan situasi yang timbul dalam proses

negosiasi. Semua keterampilan itu membolehkan seseorang dengan kecerdasan sosial tinggi sanggup berperan sebagai teman bicara dan sekaligus pendengar yang baik, serta sanggup berhubungan dengan banyak orang.

Selanjutnya orang dengan kecerdasan sosial rendah, cenderung sulit berinteraksi dengan sesamanya atau sebuah kelompok baik kelompok kecil maupun besar termasuk dalam proses pembelajaran. Di samping itu ia tidak memiliki kemampuan dalam memahami, mendengarkan dan peka terhadap maksud dan pemikiran orang lain, serta tidak merasakan dan mengamati reaksi-reaksi dan perubahan orang lain, yang ditunjukkan baik secara verbal maupun non verbal dan lamban mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi sosial dan kurang memiliki penguasaan ketrampilan komunikasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersenut di atas , dapatlah ditetapkan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimanakah Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*) Bagi Peningkatan Kecerdasan Sosial Warga Belajar Program Paket B di PKBM Kota Gorontalo?**

Secara operasional rumusan masalahnya meliputi:

1. Bagaimana kondisi objektif pembelajaran kooperatif program Paket B. Di PKBM Kota Gorontalo
2. Bagaimana model konseptual pembelajaran kooperatif program Paket B di PKBM Kota Gorontalo.

3. Bagaimana implementasi pengembangan model pembelajaran kooperatif bagi peningkatan kecerdasan sosial warga belajar Paket B di PKBM Kota Gorontalo.
4. Bagaimana efektivitas pengembangan model pembelajaran kooperatif bagi peningkatan kecerdasan sosial warga belajar Paket B di PKBM Kota Gorontalo.

C. Tujuan Penelitian

1. Secara Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran kooperatif bagi peningkatan kecerdasan sosial warga belajar Paket B di PKBM Kota Gorontalo

2. Secara Khusus:

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kondisi objektif pembelajaran kooperatif pada program Paket B. di PKBM Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui pengembangan model konseptual pembelajaran kooperatif pada program Paket B di PKBM Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui implementasi model pembelajaran kooperatif pada program Paket B di PKBM Kota Gorontalo.
4. Untuk mengetahui efektivitas pengembangan model pembelajaran kooperatif pada program Paket B di PKBM Kota Gorontalo.

E. Manfaat Penelitian

Pengembangan model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat

meningkatkan kecerdasan sosial warga belajar Paket B Di PKBM

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para praktisi PTKPNF dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Pendidikan nonformal terutama yang berhubungan konsep pembelajaran kooperatif bagi peningkatan kecerdasan sosial warga belajar program Paket B di PKBM.

Selanjutnya secara praktis penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak:

1. Bagi para tutor Program Paket B di PKBM Kota Gorontalo menjadi bahan masukan yang positif dan pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kecerdasan sosial warga belajar
2. Bagi penyelenggara dan pihak yang berwenang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen para tutor program Paket B di Kota Gorontalo
3. Sebagai bahan masukan pada para tutor Paket B untuk mengembangkan model pembelajaran kooperatif dalam rangka meningkatkan kecerdasan sosial warga belajar
4. Input dan bahan kajian bagi peneliti dan yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan fokus masalah yang sama

F. Kerangka Pengembangan Variabel Penelitian

1. Model pembelajaran kooperatif bagi warga belajar program Paket B di PKBM menjadi fokus dalam kajian penelitian dan pengembangan dalam menjawab permasalahan yaitu kesenjangan antara kondisi empirik di

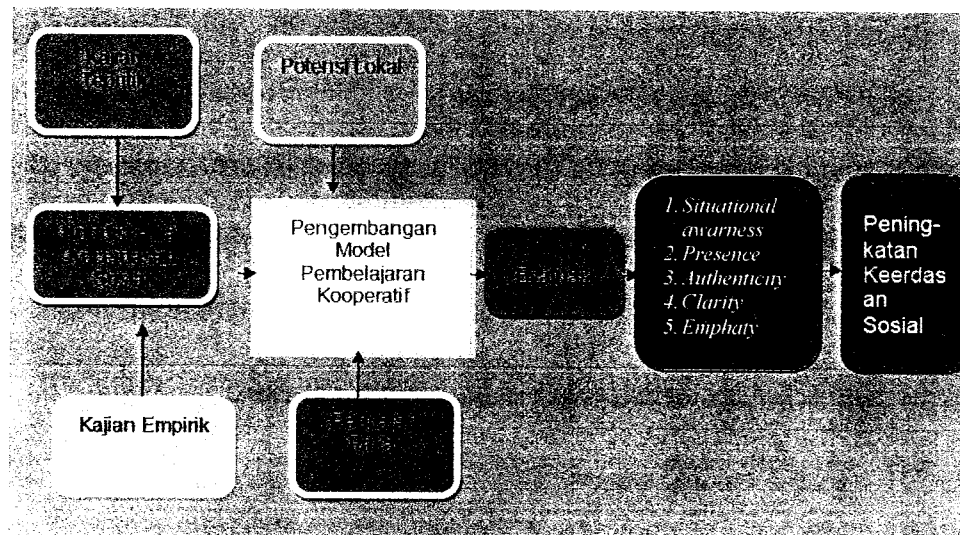
lapangan dan kajian teoretis yang ada

2. Pembelajaran kooperatif penting untuk dikemabangkan dengan alasan :
Pertama, adanya *transformasi sosial*. Pengaruh modernisasi, struktur keluarga berubah drastis banyak anak dibesarkan dalam keluarga inti tanpa kehadiran orang tua di rumah karena alasan kerja. Pengaruh televise bagi anak yang menghabiskan waktunya lebih banyak untuk menonton daripada berinteraksi dengan orang tuanya membuat kemampuan anak untuk berkomunikasi lemah. Kegiatan di sekolahpun para pendidik lebih banyak berorientasi pada perkembangan kognitif anak, sementara perkembangan moral dan sosial sekedarnya. Kedua, adanya *transformasi ekonomi*. Perlunya perubahan dalam sistem pembelajaran saat ini adalah karena alasan transformasi ekonomi. John Naisbitt, mengemukakan bahwa 90 % pekerjaan dalam era post industri bergerak dalam bidang atau berhubungan dengan informasi, ilmu pengetahuan, atau jasa. Derasnya arus informasi sudah tidak memungkinkan lagi bagi pendidik untuk bersikap mahatahu dan beranggapan bahwa anak didik perlu dimasuki dengan berbagai fakta pengetahuan dan informasi. Selain itu, keterkaitan (*interdependency*) merupakan ciri lain dari transformasi ekonomi. Pada kebanyakan pekerjaan, kepandaian atau kemampuan individu bukanlah yang terpenting. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim lebih dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan suatu usaha. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab, harus merasa terpanggil untuk mempersiapkan anak didik agar bisa berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam

berbagai macam situasi sosial. *Ketiga, transformasi demografi*. Perubahan nilai-nilai sosial dan proses sosialisasi dari dampak transformasi demografi seperti urbanisasi, kebinekaan suku bangsa dan ras merupakan hal yang serius untuk kita waspadai

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
4. Kegiatan pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan pada program Paket B di PKBM Kota Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan sosial warga belajar dalam memahami, mendengarkan dan peka terhadap maksud dan pemikiran orang lain, serta merasakan dan mengamati reaksi-reaksi dan perubahan orang lain, yang ditunjukkan baik secara verbal maupun non verbal dan mampu mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi sosial dan memiliki penguasaan ketrampilan komunikasi. Dengan kata lain pembelajarn kooperatif yang dilakukan menjadikan warga belajar percaya diri, sikap positif, kesadaran situasional, kemampuan membawa diri, ketrampilan berkomunikasi dan memiliki sikap empati.

Kerangka Pengembangan model penelitian tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 "Terdapat perbedaan kecerdasan sosial yang signifikan antara kelompok warga belajar Pendidikan Program Paket B yang menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif".